

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan teknologi informatika didalam penunjang kinerja Pemerintah adalah hal yang harus segera dilaksanakan. Kemampuan aparatur negara tidak hanya sampai dalam tahap mengoperasikan komputer saja, akan tetapi kemampuan tersebut harus dimaksimalkan untuk dapat membantu penanganan semua masalah di semua sektor Pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dimaksudkan dapat membuat administrasi menjadi lebih efisien, terencana dan aman.

Teknologi informatika merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data , termasuk memproses, mendapatkan , menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara . Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas , yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan Pemerintah, merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Salah satu fungsi teknologi informatika diharapkan dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah daerah wajib membuat Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan

keuangannya. Hal Ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan kewajiban yang jelas dan tegas bagi setiap entitas pelaporan dalam hal ini adalah pemerintah daerah, untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Meskipun entitas pelaporan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah namun penyusunan Laporan Keuangan akan dimulai dari SKPD selaku entitas akuntansi. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan pemerintah daerah merupakan konsolidasian dari semua Laporan Keuangan SKPD. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemahaman dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan menjadi wajib diketahui oleh para penyelenggara Pemerintah. Pemahaman dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan ini akan membantu personil di SKPD maupun di SKPKD untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, konsisten dari tahun ke tahun karena prosedur merupakan langkah atau acuan yang sistematis yang dapat dijadikan pedoman.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKeuDA) adalah aplikasi berbasis teknologi informatika yang dibangun oleh BPKP mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, merupakan *tools* yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah khususnya Bagian Keuangan Sekretariat dalam pengelolaan keuangan secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan aplikasi SIMKeuDA ini sangat diharapkan Pemerintah Daerah yaitu Bagian Keuangan Sekretariat dapat memanfaatkan penerapan teknologi informatika yaitu

SIMKeuDA untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Bagian Keuangan Sekretariat.

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan, serta mengoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah *“bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKeuDA) dalam pengelolaan keuangan daerah di Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai”*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi SIMKeuDA di Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Serdang Bedagai. Sedangkan tujuannya antara lain :

1. Mengetahui aspek yang dibutuhkan dalam penerapan aplikasi SIMKeuDA.

2. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan dan implementasi aplikasi SIMKeuDA di Bagian Keuangan Sekretariat.
3. Mengetahui prosedur yang benar dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMKeuDA untuk administrasi berbasis teknologi informasi.
4. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pengimplemtasian SIMKeuda di pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai konsep teoritis dalam rangka pengembangan ilmu administasi publik khususnya administrasi berbasis teknologi guna meningkatkan efektifitas di Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintahan Serdang Bedagai.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA).

1.5 Kerangka Pemikiran

Bagian Keuangan adalah unsur Staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Keuangan

mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penggunaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu menyusun konsep kebijakan keuangan daerah
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan, belanja pegawai, verifikasi dan kas daerah

Agar Bagian Keuangan Sekretariat dapat mewujudkan fungsinya tersebut, maka sebagai sebuah organisasi haruslah dapat memanfaatkan penggunaan teknologi informatika untuk membantu segala proses keuangan yang di inginkan.

Pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Bagian Keuangan Sekretariat di pengaruhi oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses dan kultur organisasi dan akan terwujud manakala kelompok pegawai Bagian Keuangan Sekretariat telah memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kerjakan.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dimana Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dalam ini Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemkab Serdang Bedagai wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-

data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi (*computerized*). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan respon positif atas terbitnya permendagri ini, dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi dimaksud adalah Program Aplikasi Komputer SIMKeuDA yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari program aplikasi sebelumnya yaitu Program Aplikasi Komputer SIMKeuDA. Program aplikasi ini telah diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Forum SAKD di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi Bogor.

Program aplikasi Komputer SIMKeuDA ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda terutama dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan pada kerangka diatas, maka dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik guna meningkatkan kemampuan pengawai dalam pengimplemtasian aplikasi SIMKeuDA dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKeuDA) di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Serdang Bedagai.